

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gender seringkali menjadi kajian ilmiah, baik yang berkaitan dengan ilmu sosial maupun ilmu keagamaan. Umumnya, perbedaan gender (*gender differences*) didasari oleh perbedaan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Menurut Nasaruddin Umar (2001: 1) perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas. Efek yang timbul akibat perbedaan itulah yang menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut gender.

Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial-kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara (Mansour Fakhri, 2001: 9). Selain itu, perbedaan gender sesungguhnya bukanlah hal yang patut dipermasalahkan sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan (Sidik Jatmika dan Vonny Nuansari, 2002: 29). Berbagai ketidakadilan yang disebabkan karena perbedaan gender dirasakan oleh kaum perempuan maupun kaum laki-laki (Ahmad Muthali'in, 2001: 32). Namun kaum perempuanlah yang seringkali mengalami ketidakadilan gender. Menurut Mansour Fakhri (1996: 63) persoalan penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan atau muslimat bukanlah persoalan kaum laki-laki melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan

gender dalam masyarakat yang salah satunya dilegitimasi oleh keyakinan agama yang bias gender. Oleh karena itu perlu adanya suatu gerakan transformasi yang menciptakan suatu sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang lebih adil. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Ashad Kusuma Djaya (2004: 5) yang menegaskan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya bukan untuk dipertentangkan atau dicari siapa yang lebih unggul diantara keduanya melainkan dipadukan untuk saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan adalah setara dan masing-masing mempunyai kelebihan.

Pada dasarnya inti ajaran Islam adalah menegakkan prinsip keadilan. Al Qur'an sebagai prinsip-prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan mencakup pelbagai anjuran untuk menegakkan keadilan baik dalam bidang ekonomi, politik dan kultural termasuk gender (Mansour Fakih, 2001: 135). Menurut Muhammad Athiyah Al Abrasyi dalam Moh. Roqib (2003: 44) pendidikan tidak bisa lepas dari kehidupan sosial yang menuju kesejahteraan manusia dunia-akhirat sehingga perlu diaplikasikan, sebab pendidikan memiliki nilai teologis dan sosiologis sekaligus.

Pendidikan Islam merupakan proses pemberdayaan membentuk pribadi yang utuh dan mampu mendayagunakan potensi perempuan secara adil sehingga dapat menyelamatkan manusia dari penindasan dan ketidakberdayaan (Hamidah, 1999: 84). Pendidikan Islam dalam mengupayakan perbaikan kehidupan diletakkan atas dasar bimbingan nilai-nilai keallahian (Yunahar Ilyas dan Muh. Azhar, 1999: 77). Selain itu, manusia sebagai subjek didik juga menjadi agen perubahan dalam berbagai permasalahan kehidupan.

Berdasarkan realita, pendidikan Islam yang berada di lingkungan pesantren kerap kali masih menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Ada masyarakat yang menerima kehadiran pesantren secara positif dan ada juga yang menerimanya secara negatif. Anggapan bahwa untuk apa perempuan berpendidikan tinggi karena pada akhirnya berada "di dapur", melayani suami dan mengurus anak di rumah merupakan subordinasi yang masih ada di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pesantren. Anggapan tersebut menyebabkan pemahaman yang kurang tepat dikalangan pendidik maupun orangtua sehingga anak perempuan atau santriwati yang masih duduk di bangku sekolah dinikahkan oleh orangtuanya jika memang sudah ada yang melamarnya. Disisi lain, secara tidak langsung hal tersebut berpengaruh pada mental anak perempuan itu sendiri karena secara psikologis mereka belum cukup umur jika harus menghadapi kehidupan rumah tangga. Realita itu juga menunjukkan bahwa ruang gerak perempuan dibatasi dalam aspek-aspek tertentu. Perempuan seakan-akan tidak mempunyai kebebasan dalam menuangkan argumen ataupun menentukan pilihan bagi masa depannya.

Fenomena tersebut diceritakan dalam sebuah film Indonesia karya Hanung Bramantyo dengan judul *Perempuan Berkalung Sorban* (selanjutnya disingkat "PBS") diambil dari sebuah novel dengan judul yang sama menceritakan tentang seorang perempuan sebagai pemeran utama yang hidup dalam kungkungan budaya patriarki yaitu budaya yang menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Sejak kecil dia mendapatkan perlakuan diskriminasi dari keluarganya di lingkungan pesantren. Dia tidak diberikan ruang untuk memimpin

seperti layaknya laki-laki dengan berbagai alasan dan dalih bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.

Perempuan yang dikisahkan dalam film tersebut menjadi "makhluk nomordua" setelah kaum laki-laki. Dia tidak diperbolehkan menggugat cerai suaminya karena dianggap suatu hal yang tabu, sementara suaminya bersikap sewenang-wenang dan melakukan kekerasan (*violence*) terhadap dirinya dalam rumah tangga. Dia berusaha keras untuk mendapatkan haknya dan satu kata yang dia perjuangkan yaitu kata "bebas". Dia ingin memperoleh "kebebasan" karena selama hidup di pesantren dengan didikan orang tuanya, dia merasa ruang geraknya dibatasi sehingga tidak dapat mengembangkan bakat yang dimilikinya dan prestasi yang dia peroleh.

Permasalahan itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini dengan mengungkap ketidakadilan gender dalam film PBS perspektif pendidikan Islam dengan mengambil fokus pada prinsip-prinsip pendidikan Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk ketidakadilan gender dalam film *Perempuan Berkalung Sorban*?
2. Bagaimana keterkaitan ketidakadilan gender dalam film *Perempuan Berkalung Sorban* dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Bentuk ketidakadilan gender yang terdapat dalam film PBS.
2. Ketidakadilan gender dalam film PBS dan kaitannya dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam.

Sedangkan manfaat penelitiannya yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperkaya kajian mengenai ketidakadilan gender dalam perspektif pendidikan Islam khususnya bagi penulis dan masyarakat secara umum.

2. Praktis

Manfaat secara praktis yaitu memberikan pemahaman mengenai ketidakadilan gender yang selama ini berkembang di kalangan masyarakat khususnya yang sering terjadi di lingkungan pesantren melalui film yang dikemas dengan media *audio-visual*.

D. Tinjauan Pustaka

Selama ini sudah banyak buku maupun hasil penelitian yang membahas mengenai gender antara lain:

Pandangan Mansour Fakhri tentang *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender* dalam buku *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam* (1996) menjelaskan tentang posisi kaum perempuan dan

kesimpulan bahwa secara prinsipil dan normatif, Islam menghargai dan memberdayakan kaum perempuan. Namun dalam masyarakat terjadi konstruksi gender yang mengakibatkan kaum perempuan didiskriminasikan. Pandangan beliau mengenai analisis gender tersebut sering dijadikan rujukan dalam memahami ketidakadilan gender.

Penelitian yang dilakukan oleh Akif Khilmiyah (1999) mengenai *Ketidakadilan Gender dalam Rumah Tangga Keluarga Muslim (Studi Kasus di Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta)* menarik kesimpulan bahwa pola pembagian kerja dalam keluarga muslim masih mengacu pada pola pembakuan peran yang memahami dan menerima adanya dikotomi peran, laki-laki di sektor publik dan perempuan di sektor domestik. Beban kerja yang berat pada perempuan, terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, lahirnya subordinasi perempuan dan melanggengnya pandangan *stereotype* terhadap perempuan dalam keluarga menjadi penyebab ketidakadilan gender dalam masyarakat.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan Pendidikan Islam mengenai *Konsep Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Pendidikan Islam* ditulis oleh Hamidah (1999) yang menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan perempuan dalam perspektif pendidikan Islam adalah suatu gagasan untuk memanusiakan perempuan dengan berusaha menciptakan kondisi yang memberikan kemungkinan bagi perempuan untuk dapat menunaikan tugas aktualisasi eksistensi dengan seluas-luasnya yang diarahkan pada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.

Selain itu, penelitian mengenai novel *Perempuan Berkalung Sorban* yang ditulis oleh Wanti Windari (2007) dengan judul *Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Keadilan Gender dalam Novel Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah El Khalieqy* menyimpulkan bahwa dalam novel *Perempuan Berkalung Sorban* tidak ditemukan adanya keadilan bagi tokoh perempuan dalam perlakuan pendidikan di lingkungan rumahnya. Cara mendidik orangtua yang bias gender berlangsung dengan sadar maupun secara tidak sadar karena pendirian yang bias gender sudah menjadi suatu sistem nilai dalam budaya di lingkungan rumah tokoh perempuan dalam novel tersebut. Demikian halnya dengan penelitian tentang *Ketidakadilan Gender dalam Novel Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah El Khalieqi: Tinjauan Sastra Feminis* yang dilakukan oleh Putri Diah Ningrum (2009) mendeskripsikan struktur yang membangun novel PBS meliputi tema, alur, latar dan penokohan serta menganalisis ketidakadilan gender dari sudut pandang sastra feminis.

Penelitian lain yang hampir serupa mengenai film PBS yang dilakukan oleh Laela Farida (2011) dengan judul *Representasi Ketidakadilan Gender di Pesantren dalam Film Perempuan Berkalung Sorban* mengambil fokus pada *stereotyping* perempuan dengan model Roland Barthes. Penelitian tersebut menyimpulkan tiga bentuk *stereotype* terhadap perempuan dalam film PBS yaitu perempuan bersifat lemah lembut, perempuan hanya pantas di sektor domestik dan perempuan mendapatkan diskriminasi dalam hal pendidikan.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, terlihat bahwa penelitian ini

mengenai keadilan maupun ketidakadilan gender dengan sasaran penelitian yang berbeda. Novel dan film adalah dua hal yang berbeda, meskipun substansinya sama. Bahasa dalam novel merupakan bahasa tulisan yang dibuat seolah-olah hidup. Akan tetapi dalam film membutuhkan bahasa tubuh yang harus diperankan sehingga terkadang berbeda dengan bahasa yang ada dalam novelnya. Pengumpulan data dalam penelitian novel hanya berdasarkan narasi atau teks, sedangkan dalam penelitian film berdasarkan adegan dan dialog yang dikemas dalam gambar dan narasi. Adapun penelitian sebelumnya membahas mengenai ketidakadilan gender menggunakan pendekatan sastra feminis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan pendidikan Islam.

Begitu juga dengan penelitian mengenai film PBS yang pernah dilakukan sebelumnya juga berbeda dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya hanya fokus pada satu bentuk ketidakadilan gender yaitu *stereotype* terhadap perempuan dan hanya sedikit yang ditemukan, sedangkan penelitian ini akan membahas semua bentuk ketidakadilan gender disertai dengan dialog dan gambar-gambar yang diambil dari adegan dalam film PBS yang tidak ditampilkan dalam penelitian sebelumnya. Penulis dalam penelitian ini akan menganalisis ketidakadilan gender dalam film PBS dan kaitannya dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Penulis berharap penelitian ini akan dapat memperkaya wacana dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan gender dalam perspektif pendidikan Islam.

E. Kerangka Teoritik

1. Ketidakadilan Gender

Kata “gender” berasal dari bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin” (Admojo, S. dan Darseno, 2005: 127). Ada dua konsep yang perlu dipahami dalam membahas gender, yaitu konsep sex (jenis kelamin) dan konsep gender itu sendiri. Konsep *sex* (jenis kelamin) merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu atau ditentukan berdasarkan anatomi tubuh secara biologis yang permanen, tidak dapat dirubah dan sesuai dengan ketentuan Tuhan atau secara kodrat sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksikan secara kultural. Misalnya perempuan itu mempunyai sifat lemah lembut, cantik, sedangkan laki-laki itu mempunyai sifat kuat, tampan, dan sebagainya. Konsep gender lebih cenderung menjelaskan tentang sifat dasar alamiah yang dimiliki oleh laki-laki atau perempuan (Sidik Jatmika dan Vonny Nuansari, 2002: 26). Jadi dapat disimpulkan bahwa gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial-budaya atau sering disebut kodrat budaya (Pusat Studi Islam, Universitas Islam Indonesia, 2009: 32).

Adapun ketidakadilan adalah lawan kata dari “keadilan” yang berasal dari kata dasar “adil”. Kata adil dalam bahasa Arab yaitu ‘*adhun-ta’diilun*’ yang berarti sama, pertengahan, lurus-meluruskan (Mahmud Yunus, 1989: 257). Kata adil dalam *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* artinya tidak memihak dan tidak memberi keputusan yang berat sebelah (Peter Salim dan Yenny Salim, 1991: 12).

Jadi, ketidakadilan bisa diartikan sikap, tindakan ataupun perilaku yang sewenang-wenang dan memihak kepada salah satu kubu.

Berdasarkan definisi di atas, ketidakadilan gender adalah memihak kepada salah satu jenis kelamin tertentu baik laki-laki maupun perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas serta karakteristik emosional yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Mansour Fakih, ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem tersebut (Achmad Muthali'in, 2001: 33).

Perbedaan gender (*gender difference*) yang selanjutnya melahirkan peran gender (*gender role*) misalnya secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan dan menyusui kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidik anak sesungguhnya tidaklah menimbulkan masalah sehingga tidak perlu digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat oleh mereka yang menggunakan 'analisis gender' adalah struktur "ketidakadilan" yang ditimbulkan oleh 'peran gender' dan 'perbedaan gender' tersebut (Mansour Fakih, 1996: 46).

Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan terutama pada perempuan. Manifestasi ketidakadilan gender masing-masing tidak bisa dipisahkan, saling terkait dan berpengaruh secara dialektis (Achmad Muthali'in, 2001: 33). Manifestasi tersebut yaitu:

a. Marginalisasi

Marginalisasi adalah proses pemiskinan terhadap kaum perempuan.

Perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

urusan penting yang terkait dengan ekonomi keluarga. Marginalisasi merupakan peminggiran peran kaum perempuan dan mereka dianggap tidak mampu melakukan pekerjaan seperti laki-laki. Menurut Mansour Fakih (2001: 14) marginalisasi dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran terhadap ajaran agama, tradisi atau kebiasaan bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

Marginalisasi terjadi akibat adanya diskriminasi terhadap pembagian kerja menurut gender. Ada jenis pekerjaan tertentu yang dianggap cocok untuk perempuan karena keyakinan gender seperti sekretaris, perawat, pramugari, kasir, guru TK atau penerima tamu. Persoalannya semakin rumit ketika pekerjaan-pekerjaan yang dianggap feminin itu selalu dinilai lebih rendah bila dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap maskulin (Achmad Muthali'in, 2001: 34).

Marginalisasi terhadap kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat kerja melainkan juga terjadi di rumah tangga, masyarakat dan negara. Proses-proses marginalisasi terhadap kaum perempuan yang terjadi dalam keluarga semakin memperkuat perbedaan marginalisasi yang terjadi di luar keluarga. Ketidakadilan itulah yang memunculkan protes kaum perempuan.

b. Subordinasi

Subordinasi yaitu anggapan rendah terhadap kaum perempuan dalam berbagai bidang. Anggapan ini selalu menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting dan suara perempuan sering diabaikan ketika pengambilan

keputusan. Subordinasi terhadap kaum perempuan adalah “...”

untuk tidak mengikutsertakan dalam setiap kesempatan yang sebenarnya bukan hanya bisa diperoleh kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan.

Kaum perempuan seringkali dinomerduakan dan lebih diutamakan laki-laki dalam hal pendidikan. Adanya anggapan bahwa walaupun perempuan sekolah tinggi-tinggi akhirnya akan ke dapur juga menyebabkan anak laki-laki selalu mendapat prioritas utama untuk belajar dan mengeyam pendidikan yang tinggi (Sidik Jatmika dan Vonny Nuansari, 2002: 33). Menurut Achmad Muthali'in (2001: 35) perempuan menjadi pilihan pertama untuk tidak disekolahkan jika suatu keluarga mengalami kendala biaya. Subordinasi juga sebagai kelanjutan dari pandangan bahwa perempuan adalah makhluk emosional, maka ia dipandang tidak bisa memimpin dan ditempatkan pada posisi yang tidak penting (Achmad Muthali'in, 2001: 35).

c. *Stereotype*

Stereotype adalah pelabelan negatif terhadap jenis kelamin tertentu dan akibatnya terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. *Stereotype* yang dilabelkan kepada perempuan akibatnya membatasi, menyulitkan, memiskinkan dan merugikan kaum perempuan. Adanya keyakinan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah (*bread winner*) misalnya, maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai 'tambahan' oleh karena itu perempuan dapat dibayar rendah (Mansour Fakhri, 1996: 48). Hal ini pula yang menyebabkan peningkatan karier dan kesempatan berprestasi bagi kaum perempuan terhambat karena dipandang tidak terlalu

serius dalam menggeluti kariernya dan hanya sebagai sambilan (Achmad Muthali'in, 2001: 38-39).

Stereotype yang bersumberkan pandangan gender dan dikembangkan melalui suatu keyakinan tafsiran agama merupakan bentuk ketidakadilan bagi perempuan. Misalnya pelabelan bahwa perempuan sebagai makhluk pesolek sehingga setiap ada kasus pelecehan seksual selalu menyalahkan korbannya yang dianggap memancing perhatian lawan jenisnya yaitu laki-laki (Mansour Fakh, 1996: 58). Demikian halnya seperti kasus belakangan ini mengenai pelecehan seksual yaitu pemerkosaan di angkot maka kecenderungan masyarakat lebih menyalahkan korbannya yaitu kaum perempuan.

Stereotype terhadap perempuan juga bisa dilihat dari penggunaan kata 'wanita' untuk menyebut 'perempuan'. Kata 'wanita' dalam *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* yaitu orang perempuan; sebutan bagi seorang perempuan agar kelihatan lebih halus (Peter Salim dan Yenny Salim, 1991: 1136). Sedangkan wanita dalam bahasa Jawa merupakan kependekan dari "wani ditata". Maksudnya adalah perempuan harus merelakan dirinya untuk diatur, khususnya oleh laki-laki atau suaminya dalam kehidupan rumah tangga. (Achmad Muthali'in, 2001: 37).

d. *Violence*

Violence (kekerasan) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan yang disebabkan perbedaan gender. Kekerasan tersebut mulai dari kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan sampai kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti pelecehan seksual dan penciptaan

ketergantungan. Banyak sekali kekerasan terhadap perempuan yang ditimbulkan karena *stereotype* gender (Mansour Fakih, 1996: 48). Bentuk kekerasan terhadap perempuan, bisa berupa kekerasan fisik maupun non fisik yang berlaku di tingkat rumah tangga, tingkat negara bahkan sampai pada tafsir agama (Achmad Muthali'in, 2001: 40). Hal itu juga sejalan dengan pendapat Mansour Fakih (1996: 55) bahwa *violence* adalah suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.

e. *Double burden*

Double burden (beban ganda) yang dialami oleh kaum perempuan disebabkan karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama. Mansour Fakih (1996: 49) menegaskan bahwa sosialisasi peran gender tersebut menyebabkan rasa bersalah perempuan jika tidak melakukan pekerjaan domestik, sementara bagi kaum laki-laki merasa bukan tanggung jawabnya bahkan banyak tradisi melarangnya untuk berpartisipasi dalam pekerjaan domestik.

Pembagian kerja di dunia domestik seringkali dibebankan kepada perempuan, sementara laki-laki di sektor publik sehingga ketika perempuan pergi ke sektor publik ada beban ganda yang disandangnya. Beban ganda ini sebagian besar dijalani oleh kaum perempuan yang semestinya juga menjadi beban ganda untuk kaum laki-laki karena memang pekerjaan domestik bukanlah kodrat perempuan (Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 2009: 35). Ketidakeadilan bagi perempuan dalam hal ini adalah di

berlipat ganda, tidak berharga secara ekonomis sekaligus rendah secara sosial (Achmad Muthali'in, 2001: 40).

Semua manifestasi ketidakadilan tersebut menciptakan suatu struktur ketidakadilan gender yang melahirkan diskriminasi terhadap kaum perempuan (Sidik Jatmika dan Vonny Nuansari, 2002: 10). Ketidakadilan gender itulah yang melatarbelakangi munculnya gerakan Feminisme. Pandangan Husein Muhammad (2009: 24) tentang para pemikir feminis yang menyatakan bahwa posisi-posisi perempuan yang mengalami ketidakadilan gender disebabkan karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak kaum laki-laki. Firman Allah Swt dalam Q.S. An Nisa': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.....

Artinya: Kaum laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, ialah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka).....

Asghar Ali Engineer yang termasuk salah seorang feminis Muslim menyatakan bahwa Q.S. An Nisa': 34 di atas tentang kepemimpinan suami atas istri, bersifat kontekstual bukan normatif. Apabila konteks sosialnya berubah, doktrin itu dengan sendirinya juga akan berubah. Adapun menurut mufassir, Al Qur'an mengemukakan dua alasan mengapa suami yang menjadi pemimpin. *Pertama*, karena kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. *Kedua*, karena kewajiban mereka memberi nafkah keluarga (Yunahar Ilyas, 1997: 146-

147). Berdasarkan kedua pandangan di atas, Yunahar Ilyas (1997: 151) berpendapat bahwa perbedaan penafsiran antara para feminis Muslim dan mufassir disebabkan oleh latar belakang pemikiran masing-masing. Penyebab lain adalah dari aspek metodologi. Para mufassir tidak menggunakan pendekatan kontekstual sebagaimana yang dilakukan oleh para feminis Muslim.

Selain itu, bias gender dalam penafsiran teks berdasarkan tradisi Islam menurut Nasaruddin Umar (2001: 265-290) juga dapat ditelusuri dalam beberapa faktor sebagai berikut: 1) Pembakuan tanda huruf, tanda baca, dan *qir'at*; 2) Pengertian kosa kata (*Mufrodah*); 3) Menetapkan rujukan kata ganti (*Dlamir*); 4) Menetapkan batas pengecualian (*Istitsna'*); 5) Menetapkan arti huruf '*Atf*'; 6) Bias dalam struktur Bahasa Arab; 7) Bias dalam Kamus Bahasa Arab; 8) Bias dalam metode tafsir; 9) Pengaruh riwayat *Israiliyat*; 10) Bias dalam pembakuan dan pembakuan kitab-kitab fiqh.

Kekhususan-kekhususan yang diperuntukkan kepada laki-laki, seperti seorang suami setingkat lebih tinggi di atas isteri (Q.S. Al Baqarah: 228), laki-laki pelindung (pemimpin) bagi perempuan (Q.S. An Nisa': 34), laki-laki memperoleh bagian warisan lebih banyak (Q.S. Al Baqarah: 11), menjadi saksi yang efektif (Q.S. Al Baqarah: 282) dan diperkenankan poligami bagi yang memenuhi syarat (Q.S. An Nisa': 3) tetapi ini semua tidak menyebabkan laki-laki menjadi hamba-hamba utama. Kelebihan-kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial ketika ayat-ayat Al Qur'an diturunkan (Nasaruddin Umar, 2001: 249).

Adapun dalam hal pekerjaan Islam juga tidak merinci pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Islam hanya menetapkan tugas-tugas pokok masing-masing dan menggariskan prinsip kesejajaran dan kemitraan atas dasar musyawarah dan tolong menolong seperti dalam Q.S. At Taubah: 71. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga, suami berkewajiban memperhatikan hak dan kepentingan istrinya sedangkan istri juga berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya, tetapi disisi lain istri berhak mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi.

Menurut Nasaruddin Umar (2001: 247-263) prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al Qur'an yaitu: *Pertama*, laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah Swt. *Kedua*, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. *Ketiga*, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial yaitu sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama sejak dalam kandungan. *Keempat*, Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis yaitu cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai diturunkan ke bumi. *Kelima*, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.

Plato mengklaim, dengan bahasa yang tegas bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kemampuan yang sama. Perempuan dapat melaksanakan segala kewajiban dan tanggungjawab laki-laki sehingga mereka juga layak menikmati hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki (Murtadha Muthahhari, 1997: 108). Siti Chamamah Soeratno (2005: 76) dalam *Wacana Fiqh Perempuan; Perspektif Muhammadiyah* juga menegaskan bahwa ketika perempuan berkiprah di sektor publik, keluar rumah masuk ke medan masyarakat, tidak ada perbedaan

pemimpin pada wilayah *'udma* sekalipun, itu sejalan dan mengikuti perintah Allah dalam Al Qur'an dan Al Hadis.

2. Film *Perempuan Berkalung Sorban*

Film adalah sebuah media massa yang mampu menjangkau khalayak yang lebih luas, bahkan sampai ke wilayah pedesaan. Teknologi *audio visual* yang melekat pada film membuatnya lebih menarik perhatian publik dari pada media massa cetak. Film merupakan perkembangan media massa yang ketiga setelah perkembangan media buku dan media cetak berupa koran.

Media massa dalam pendekatan teori kritis dipahami sebagai pemain yang mempunyai kekuatan pengaruh yang sangat besar dalam pertarungan ideologis. Media dalam paradigma teori kritis sendiri dapat dipahami dalam berbagai artikulasi salah satunya media massa dipahami sebagai arena pertarungan dari berbagai kepentingan ideologi yang hidup di masyarakat. Artikulasi sendiri bermakna sebagai pemahaman kita terhadap sebuah realitas yang berasal dari berbagai sumber. Ketika berhadapan dengan ideologi, media mempunyai posisi yang kuat. Tanpa kehadiran media, ideologi tidak dapat tersebarluaskan (Fajar Junaedi, 2007: 31).

Film yang diambil dalam penelitian ini adalah film PBS yang dirilis pada tahun 2009 dan dibintangi oleh Revalina S. Temat. Hanung Bramantyo sebagai sutradara dalam film PBS sudah menghasilkan 21 karya film dari tahun 2000

sampai tahun 2011 ini dan beberapa film diantaranya adalah *11* ini ini ini

Ayat-Ayat Cinta (2008), *Perempuan Berkalung Sorban* (2009) dan *Sang Pencerah* (2010) yang diambil dari cerita novel yang termasuk dalam kategori *best seller*.

Film PBS merupakan cerita Islami dari novel karangan Abidah El Khalieqi yang menceritakan tentang seorang perempuan bernama Annisa. Dia dibesarkan di lingkungan pesantren yang diberi nama pesantren Al Huda. Annisa merupakan anak perempuan dari tiga bersaudara, dan anak dari pengasuh pesantren tersebut. Annisa dididik oleh orang tua yang kental dengan budaya patriarki yang didasarkan pada penafsiran agama sehingga karena itulah dia selalu mendapatkan perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan bagi kaum perempuan.

Diskriminasi terhadap perempuan yaitu setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan dan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan (Toeti Heraty, 1999: 6).

Annisa memperjuangkan haknya untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Dia merasa didiskriminasikan ketika ayahnya melarang untuk meneruskan ke jenjang perguruan tinggi, sementara kedua kakaknya yang laki-laki diperbolehkan dan dibiayai untuk melanjutkan sekolah di Universitas Al Azhar, Mesir. Sementara Annisa yang mendapatkan beasiswa untuk masuk ke salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta tidak diizinkan oleh ayahnya dengan

Sementara itu, Islam sendiri telah mewajibkan dan memberikan hak yang sama bagi kaum laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu di sepanjang hidupnya tanpa memberikan batasan tempat ataupun tingkatan tertentu (Muh. Ali Al Hasyimi, 1997: 118). Rasulullah Saw bersabda, "*Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim*". Kata "muslim" tidak hanya diartikan untuk kaum laki-laki, tetapi juga diartikan untuk kaum perempuan.

3. Pendidikan Islam

Pendidikan dari sudut pandang manusia diartikan sebagai proses sosialisasi yakni memasyarakatkan nilai-nilai, ilmu pengetahuan dan ketrampilan dalam kehidupan. Sedangkan dari sudut pandang individu, pendidikan adalah proses perkembangan yakni perkembangan potensi yang dimiliki secara maksimal dan diwujudkan dalam bentuk konkrit dalam arti berkemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berguna untuk kehidupan manusia serta mampu berdialog dengan dirinya sendiri, alam sekitar dan dengan realitas yang absolut yaitu Tuhannya (Khoiron Rosyadi, 2009: 136-137).

Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan aspek-aspek rohaniah dan jasmaniah harus berlangsung secara bertahap. Akan tetapi suatu proses yang digunakan dalam usaha kependidikan adalah proses yang terarah dan bertujuan yaitu mengarahkan anak didik (manusia) kepada titik optimal kemampuannya. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah terbentuknya kepribadian yang bulat dan utuh sebagai manusia individual, sosial dan hamba

Tuhan yang mengabdikan diri kepadaNya (Khoiron Rosyadi, 2009: 135)

Adapun pendidikan Islam secara etimologi dikenal dengan istilah *tarbiyah*, *ta'lim*, *ta'dib*, dan *riyadhah*. Masing-masing istilah tersebut mempunyai makna tersendiri, namun kesemuanya akan memiliki makna yang sama jika disebut salah satunya, karena salah satu istilah itu sebenarnya mewakili istilah yang lain (Abdul Mujib dan Jusuf Mudazakkir, 2006: 10). Sebagian para ahli menerjemahkan istilah *tarbiyah* dengan pendidikan, sedangkan *ta'lim* diterjemahkan dengan pengajaran. Pendidikan (*tarbiyah*) tidak saja tertumpu pada domain kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik sementara pengajaran (*ta'lim*) lebih mengarah pada aspek kognitif. Kata *ta'dib* lazimnya diterjemahkan dengan pendidikan sopan santun, tata krama, adab, budi pekerti, akhlak, moral dan etika. Menurut peneliti, kata *ta'dib* lebih mengarah pada aspek afektif. Sedangkan *riyadhah* menurut Al Bastani dalam konteks pendidikan berarti mendidik jiwa anak dengan akhlak mulia. Pendapat lain mengatakan bahwa *riyadhah* lebih mengarah pada aspek psikomotorik. Dalam khazanah literatur keislaman, istilah *tarbiyah* lebih populer dan sering digunakan oleh para ahli dalam penyebutan pendidikan Islam.

Pendidikan Islam secara terminologi adalah proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat (Abdul Mujib dan Jusuf Mudazakkir, 2006: 27).

Dasar-dasar pendidikan Islam yaitu Al Qur'an, As Sunah, Al Kaun dan Ijtihad (Khoiron Rosyidi, 2000: 153). Selain itu, tujuan pendidikan Islam adalah

terbentuknya insan kamil yang di dalamnya memiliki wawasan khaffah agar mampu menjalankan tugas-tugas kehambaan, kekhalifahan, dan pewaris nabi (Abdul Mujib dan Jusuf Mudazakkir, 2006: 83). Perumusan tujuan pendidikan Islam haruslah disesuaikan juga dengan tujuan dan tugas hidup manusia. Tujuan hidup manusia hanya untuk mengabdikan yaitu beribadah kepada Allah SWT dan sebagai khalifah di muka bumi, seperti dalam firmanNya surat Al Baqarah: 30.

Adapun prinsip-prinsip pendidikan Islam menurut Muhammad Athiyah Al Abrasyi adalah persamaan, demokrasi, kebebasan dan keadilan. Nilai persamaan antara laki-laki dan perempuan tidak akan bisa terwujud tanpa adanya demokrasi. Demokrasi tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan dalam berpikir, bertindak dan menentukan pilihan-pilihan. Selain itu, demokrasi juga tidak akan berjalan apabila tidak ada nilai-nilai keadilan (Moh. Roqib, 2003: 43). Menurut Athiyah dalam Moh. Roqib (2003: 101) pada dasarnya, manusia memiliki derajat yang setara dihadapan Allah SWT. Manusia harus diberi kebebasan dan peran yang berkeadilan dan berperikemanusiaan karena prinsip tersebut tidak bisa dilepaskan dari demokrasi pendidikan Islami.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam pendidikan Islam sekolah berfungsi sebagai sarana transfer nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Sekolah merupakan sarana sosialisasi kebudayaan yang dalam prosesnya berlangsung secara formal. Gender merupakan konstruksi budaya yang proses sosialisasinya juga berlangsung di sekolah. Sekolah melakukan transfer nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat termasuk nilai dan norma gender. Nilai dan norma tersebut

dalam buku pelajaran maupun dalam perlakuan-perlakuan yang mencerminkan nilai dan norma gender yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat (Achmad Muthali'in, 2001: 56). Pendidikan pesantren tidak lain juga sebagai lembaga pendidikan Islam secara formal dan berkaitan dengan nilai-nilai ataupun kebudayaan dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya (Nana Syaodih Sukmadinata, 2009: 18). Sedangkan data deskriptif merupakan data berupa gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 2003: 54). Adapun menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2009: 60) penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Hal di atas sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 1998: 3). Jadi, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial masyarakat mengenai ketidakadilan gender melalui film PBS.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu film berjudul *Perempuan Berkalung Sorban* (PBS). Film ini merupakan hasil karya dari seorang sutradara yaitu Hanung Bramantyo yang diproduksi oleh Kharisma Starvision Plus.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Menurut Lexy J. Moleong (1998: 161) dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau perekaman video dan pengambilan foto atau film (Lexy J. Moleong: 1998: 112). Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi simbol-simbol dan tanda yang mewakili bentuk dari ketidakadilan gender dalam film PBS.

Selain itu, metode pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan observasi langsung yaitu dengan pengamatan terhadap alur cerita atau adegan dalam film PBS yang terbatas pada gambar dan narasi yang diambil dari film tersebut. Pengumpulan data berupa gambar ini menggunakan program

4. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode etnografi dan metode analisis semiotika yang dikembangkan oleh Roland Barthes. Semiotika adalah instrument pembuka rahasia teks dan penandaan (Kurniawan, 2001: 12). Metode semiotika yaitu metode yang memfokuskan dirinya pada tanda dan segala yang berhubungan dengannya (Aart van Zoest dalam buku *Serba-Serbi Semiotika*, 1996: 5). Saussure meletakkan tanda dalam konteks komunikasi manusia dengan pemilahan antara *signifiant* (penanda) dan *signifie* (petanda). *Signifiant* adalah bunyi atau coretan yang bermakna yakni apa yang dikatakan dan ditulis atau dibaca, sedangkan *signifie* adalah gambaran mental yakni pikiran atau konsep dari bahasa (Kurniawan, 2001: 14). Adapun dalam penelitian ini, metode semiotika digunakan untuk mengidentifikasi tanda-tanda yang mengandung unsur ketidakadilan gender melalui adegan dan dialog.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode analisis gender model Harvard yang meliputi akses, peran, kontrol dan manfaat. Adapun langkah-langkah analisisnya yaitu data berupa gambar dan dialog dalam film PBS dianalisis berdasarkan tanda-tanda yang mengandung unsur ketidakadilan gender kemudian dianalisis dengan analisis gender model Harvard

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini mengenai *Ketidakadilan Gender dalam Film Perempuan Berkalung Sorban (Perspektif Pendidikan Islam)* dibagi menjadi empat bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Film Perempuan Berkalung Sorban

Memuat tentang gambaran umum film *Perempuan Berkalung Sorban* dan data-data film *Perempuan Berkalung Sorban* yang meliputi pemeran film, departemen produksi, sinopsis film *Perempuan Berkalung Sorban* dan profil sutradara.

BAB III : Analisis Ketidakadilan Gender dalam Film Perempuan Berkalung Sorban Perspektif Pendidikan Islam

Berisi tentang bentuk ketidakadilan gender dalam film *Perempuan Berkalung Sorban* dan ketidakadilan gender dalam film *Perempuan Berkalung Sorban* dan kaitannya dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam.

BAB IV : Penutup

Meliputi kesimpulan dan saran.